

**PENGARUH DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH, KOMITE AUDIT, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN IDENTITAS
ETIKA PADA BANK UMUM SYARIAH**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Laila Diannatia

No Mahasiswa: 19312475

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**PENGARUH DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN
PENGAWAS SYARIAH, KOMITE AUDIT, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN IDENTITAS ETIKA
PADA BANK UMUM SYARIAH**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh:

Nama: Laila Diannatia

No Mahasiswa: 19312475

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang ditulis tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan pernyataan yang berlaku.”

Yogyakarta, 12 September 2023



(Laila Diannatia)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disahkan dan disetujui oleh dosen pembimbing skripsi dengan judul: Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Identitas Etika Pada Bank Umum Syariah

Skripsi

Diajukan Oleh:

Nama: Laila Diannatia

No Mahasiswa: 19312475

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 12 September 2023

Dosen Pembimbing,



(Ataina Hudayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Identitas Etika Pada Bank Umum Syariah

Disusun oleh : LAILA DIANNATIA

Nomor Mahasiswa : 19312475

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 03 Oktober 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D

Penguji : Ahada Nur Fauziya, SE., Ak., M.Ak.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, Ph.D., CFRA, CertIPSAS.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kepada Allah subhaanahu wa ta'aala, yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan petunjuk selama proses penulisan skripsi ini, semua atas izin Allah subhaanahu wa ta'aala sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Identitas Etika Pada Bank Umum Syariah”.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Allah subhaanahu wa ta'aala karena telah memberikan kekuatan, petunjuk, kelancaran, dan kemudahan selama menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua tercinta Nana Nahrowi dan Sri Hartuti, terima kasih untuk mamah dan papah yang tiada henti dan tak lelah memanjatkan do'a, mendukung, menyemangati, membesarkan, dan mendidik penulis;
3. Kedua kakak beserta keluarganya dan kedua adik tersayang, Natia Ayu Aqmarina Pintasari, Zulfikri Panca Wardana, Nurmalita Natia Dewi, Muhammad Ikhsan, Denatia Salsabila, dan Muhammad Dimastian Kafi, terima kasih karena selalu mendoakan, mendukung, dan memberi semangat;
4. Ibu Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah dengan tulus, sabar, dan ikhlas memberikan bimbingan, saran, serta arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi;
5. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., PhD., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia;

6. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H, M.Sc., PhD., SAS, ASPM., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia;
7. Sahabat-sahabat seperjuangan yang menemani dari awal sampai akhir perkuliahan, Hanuningtyas Muthmainah, Hasna Qanita Qalbi, Lutfiana Nur Khaya, Nur Haliza Prastyaningtyas, dan Nor Afiyani, terima kasih karena selalu menyemangati;
8. Sahabat-sahabat semasa SMP penulis, Juwita Sari Dewi, Kharisma Dewi, dan Nurul Hasanah, terima kasih atas do'a, dan dukungannya;

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semoga hasil penelitian skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, pembaca, dan peneliti selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 8 September 2023

Penulis,



Laila Diannatia

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
Abstrak.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Stakeholders Theory	12
2.1.2 Legitimacy Theory.....	13
2.1.3 Perbankan Syariah	15
2.1.4 Corporate Ethical Identity.....	17
2.1.5 Corporate Governance	22
2.1.6 Ukuran Perusahaan	27
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Hipotesis Penelitian	36
2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Identitas Etika Bank Syariah	36

2.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Identitas	37
Etika Bank Syariah	37
2.3.3 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Identitas Etika Bank Syariah	38
2.3.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Identitas Etika Bank Syariah	39
2.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Identitas Etika Bank Syariah	40
2.4 Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	43
3.2 Populasi dan Sampel	43
3.3 Metode Pengumpulan Data	44
3.4 Operasional Variabel Penelitian	45
3.4.1 Variabel Dependen	45
3.4.2 Variabel Independen	46
3.5 Teknik Analisis	47
3.5.1 Statistik Deskriptif	47
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	48
3.6 Uji Hipotesis dan Analisis Data	49
3.6.1 Analisis Data	49
3.6.2 Uji Hipotesis	50
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	52
4.2 Analisis Data	53
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	53
4.2.2 Tingkat Pengungkapan Identitas Etika	55
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	58
4.2.4 Uji Hipotesis	64
4.3 Pembahasan	70
4.3.1 Pengaruh ukuran Dewan Direksi terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah	70

4.3.2 Pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah	71
4.3.3 Pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah	72
4.3.4 Pengaruh ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah	72
4.3.5 Pengaruh ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	76
Daftar Pustaka.....	77
Lampiran.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Indikator Ethical Identity Index (EII).....	21
Tabel 2.2: Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1: Daftar Bank Umum Syariah	44
Tabel 4.1: Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian	52
Tabel 4.2: Uji Statistik Deskriptif.....	53
Tabel 4.3: Hasil Item yang Diungkapkan	56
Tabel 4.4: Tingkat Pengungkapan EII.....	57
Tabel 4.5: Uji Normalitas Data.....	59
Tabel 4.6: Uji Multikolinearitas	60
Tabel 4.7: Uji Heteroskedastisitas	61
Tabel 4.8: Uji Durbin Watson	63
Tabel 4.9: Transformasi Cochran Orcutt	64
Tabel 4.10: Analisis Linear Berganda	65
Tabel 4.11: Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	67
Tabel 4.12: Uji Signifikansi Simultan (Uji f)	68
Tabel 4.13: Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Model Penelitian.....	42
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Perhitungan EII.....	81
Lampiran 2: Hasil Data Variabel Independen	83

ABSTRAK

This study aims to examine the influence of the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, and Company Size on the Disclosure of Sharia Banking Ethical Identity. This research uses data from 13 Sharia Commercial Banks registered with the Financial Services Authority for the period 2017 to 2021, using purposive sampling to determine the research sample. The results of the analysis show that the size of the Board of Directors, the size of the Board of Commissioners, the size of the Sharia Supervisory Board, and the size of the Audit Committee do not have a significant effect on the disclosure of ethical identity in islamic commercial banks in Indonesia. Meanwhile, company size has a negative significant effect on ethical idntity disclosure in islamic commercial banks in Indonesia.

Keywords: *Ethical Identity Disclosure; Size of the Board of Directors; Size of the Board of Commissioners; Size of the Sharia Supervisory Board; Size of the Audit Committee; and Company Size.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan identitas etika pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan data dari 13 Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan periode 2017 hingga 2021, dengan menggunakan *purposiv sampling* sebagai penentuan sampel penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah di Indonesia pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Pengungkapan Identitas Etika; Ukuran Dewan Direksi; Ukuran Dewan Komisaris; Ukuran Dewan Pengawas; Ukuran Komite Audit; dan Ukuran Perusaha

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Fitria & Sulhani (2021) tujuan pendirian perbankan syariah yaitu untuk menyebarkan dan mengembangkan lebih lanjut penerapan prinsip-prinsip Islam di bidang keuangan dan perbankan. Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam dan adanya keinginan masyarakat melakukan aktivitas perbankan sesuai syariat Islam menyebabkan semakin gencarnya perkembangan bank syariah di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 memberikan landasan yang lebih legal bagi pengembangan sektor perbankan syariah sehingga dapat mempercepat pertumbuhan. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan manfaat dan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta perekonomian nasional. Semakin berkembangnya perbankan syariah maka semakin kompetitif pula persaingan di industri perbankan syariah. Oleh karena itu, sangat penting untuk perbankan syariah menjaga citra perusahaan, kepercayaan pemangku kepentingan, dan masyarakat. Untuk membangun kepercayaan tersebut, perbankan syariah harus selalu berpegang pada prinsip syariah dalam setiap aktivitas bisnisnya (Fitria & Sulhani, 2021).

Menurut Gray & Balmer (1998), identitas perusahaan merupakan realitas serta keunikan organisasi melalui komunikasi internal maupun eksternal yang berkaitan dengan citra dan reputasi perusahaan. Dari komunikasi perusahaan inilah

para pemangku kepentingan melihat identitas, citra, serta reputasi yang mendeskripsikan kondisi perusahaan tersebut. Tiga komponen identitas setidaknya harus dimiliki perusahaan, yaitu nilai etis, perilaku, serta komunikasi pada komitmen etika. Informasi identitas perusahaan dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui laporan tahunan. Informasi mengenai identitas perusahaan dapat meningkatkan citra sehingga menciptakan kepercayaan positif dan keunggulan kompetitif pada perbankan syariah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai nilai yang dianut oleh golongan atau masyarakat mengenai benar dan salah. Ini menjelaskan bahwa etika merupakan nilai dan norma yang dijadikan pegangan dalam mengatur tingkah laku seseorang atau suatu kelompok tertentu (Bertens, 1993). Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang senantiasa mengedepankan nilai etika dalam bisnis. Etika merupakan bagian yang mengakar dalam praktik bisnis Islam sehingga perilaku tidak etis harus diatasi secara *default*.

Prinsip syariah yang diterapkan pada perbankan syariah belum bisa menghilangkan kecurangan maupun perilaku tidak etis. Kecurangan dan perilaku tidak etis pernah terjadi di perbankan syariah, yaitu pada tahun 2014 terjadi kasus money game dengan skema investasi emas Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) serta Gold Bullion Indonesia (GBI) di Bank Mega Syariah. Pada tahun 2017 PT. Borne Aura Sukses menggugat Bank Syariah Mandiri karena melakukan tindakan wanprestasi dan dianggap melakukan kredit fiktif karena melanggar perjanjian dalam akad musyarakah. Kasus lainnya yang juga terjadi yaitu kasus permodalan Bank Muamalat Indonesia dan pinjaman fiktif BJB Syariah. Ini

menandakan bahwa perbankan syariah belum maksimal dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Efek yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya menyebabkan identitas perbankan syariah rusak sehingga nama perbankan syariah tercoreng membuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah menurun, dan rendahnya investasi pada sistem perbankan syariah di Indonesia (Sukardi, 2020). Menurut Gadhoom dkk. (2022), dampak dari aktivitas yang tidak etis berimplikasi pada perlunya kerangka peraturan dan mekanisme penegakan hukum yang efektif dalam perbankan syariah untuk membiasakan prinsip-prinsip moral dan etika dalam praktik perbankan syariah. Seiring dengan kegagalan perusahaan tersebut, terjadi peningkatan kesadaran akan perlunya prinsip moral dan praktik etika bisnis yang beretika yang mempengaruhi reputasi perbankan syariah. Bahkan jika masalah tersebut disebabkan oleh banyak faktor yang mungkin, seperti tekanan dari manajemen untuk memenuhi ekspektasi kinerja, tekanan kompetitif dari rekan kerja, dan ketidakefektifan komite syariah, bank tidak berkepentingan untuk melaporkannya karena risiko reputasi. Oleh karena itu, perbankan syariah dapat menerapkan pedoman pelaporan etis untuk mengurangi masalah tersebut dan mengurangi asimetri informasi. Dalam hukum komersial islam, transparansi serta pengungkapan informasi adalah faktor kunci keberhasilan hubungan kontraktual. Oleh karena itu, perbankan syariah memiliki tanggungjawab etis untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan kepada semua pemangku kepentingan (Rahman dkk., 2016). Secara khusus, pada tahun 2010, AAOIFI menerbitkan Standar Terkait Tata Kelola untuk Pelaporan Sosial dan Etika(No.7), untuk mendorong perbankan syariah mengungkapkan lebih banyak

informasi non-keuangan, yang secara langsung menyiratkan tanggung jawab etis dan sosial. Standar ini membantu perbankan syariah memenuhi tanggung jawab sosial dan etika mereka terhadap Allah serta pemangku kepentingannya (Gadhoudk., 2022).

Identitas etika dapat mencerminkan kondisi, sikap, serta komitmen perbankan syariah. Semakin tinggi pengungkapan identitas etika Islam maka menunjukkan semakin tingginya tingkat ketaatan perbankan syariah pada prinsip syariah dan semakin tingginya tingkat tata kelola di perbankan syariah (Rahman dkk., 2014). Dalam islam, umat muslim dituntut untuk berlaku jujur, adil, dan menjaga hubungan sosial pada setiap perkara sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat (49) : 9. Selain itu dijelaskan juga pada QS. Al-Baqarah (1) : 71 mengenai nilai kebenaran yang menjadi dasar adanya kegiatan pengungkapan. Pengungkapan identitas etika yang jujur dan transparan dalam laporan tahunan perbankan syariah dapat menjadi indikator bahwa perbankan syariah telah memenuhi tanggung jawab sosialnya dalam tata kelola perusahaan. Dengan berlaku jujur dan senantiasa menjaga hubungan sosial, perbankan syariah dapat memberikan rasa aman sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Santos (2017) menyatakan bahwa penerapan *corporate governance* dapat mempengaruhi pengukuran pengungkapan identitas etika perbankan syariah. Dalam pelaksanaan mekanisme *corporate governance*, fungsi pengawasan dan pengelolaan dilakukan oleh organ-organ terpisah yang akan mengelola perusahaan serta memberikan informasi kepada pemangku kepentingan dikarenakan di

Indonesia sendiri menganut *two-tier system*. Prinsip *corporate governance* dalam penerapannya berkaitan dengan pengungkapan informasi perusahaan kepada publik yang berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi. Perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang kuat dapat mengungkapkan informasi yang lebih banyak dan akan bisa mewujudkan transparansi serta akuntabilitas perusahaan. Dewan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan komite audit merupakan organ-organ yang memiliki peran dalam *corporate governance* perbankan syariah. Semakin optimal penerapan *corporate governance* maka kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah akan semakin meningkat dan dapat memberikan citra baik untuk perbankan syariah.

Semakin besar jumlah anggota dewan direksi, maka kemampuan pemantauan dewan akan meningkat karena hubungan yang signifikan antara organisasi dan *stakeholder* cenderung meningkatkan tingkat pengungkapan yang lebih besar serta menghasilkan lebih banyak informasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman dkk. (2016) ukuran dewan direksi secara signifikan mempengaruhi pengungkapan identitas etika pada bank umum syariah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rizwan dkk. (2022) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank umum syariah. Berbeda dengan penelitian Milenia & Syafei (2021) menyatakan ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah, serta sejalan dengan penelitian oleh Khasanah & Amalia (2021) ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah.

Menurut Istifarah & Subardjo (2017), karena dinilai menjadi mekanisme pengendalian internal tertinggi, maka semakin banyak dewan komisaris dalam suatu perusahaan akan semakin baik pengendalian internal perusahaannya karena dapat meminimalisir informasi yang ditutupi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rokhaniyah (2020) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah, penelitian tersebut didukung oleh penelitian Murdiansyah (2021) ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Milenia & Syafei (2021) bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah.

Dewan pengawas syariah memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan identitas etika pada perbankan syariah. Rahman dkk. (2016) melakukan penelitian yang hasilnya menyatakan ukuran dewan pengawas syariah secara signifikan mempengaruhi pengungkapan identitas etika pada bank syariah. Penelitian yang dilakukan Milenia & Syafei (2021) juga menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah secara signifikan mempengaruhi pengungkapan identitas etika pada bank syariah. Berbeda dengan hasil dari penelitian Harun dkk. (2020) ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah, yang didukung oleh penelitian Khasanah & Amalia (2021) ukuran dewan pengawas syariah memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rokhaniyah (2020) menyatakan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah, hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Khasanah & Amalia (2021) ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah. Tetapi hasil penelitian tersebut berbeda dengan Harun dkk. (2020) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah, yang juga didukung oleh penelitian Jahid dkk. (2020) ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah.

Ukuran perusahaan juga bisa dijadikan faktor penentu pengungkapan identitas etika, karena ukuran perusahaan mencerminkan kondisi dari perusahaan. Tri & Pranomo (2022) menyatakan perusahaan dengan potensi yang besar permintaan publiknya mengenai informasi lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan maka informasi perusahaan yang tersedia bagi para pemangku kepentingan semakin banyak (Prasetyoningrum, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Tri & Pranomo (2022) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah, yang didukung oleh penelitian yang dilakukan Al Maeeni dkk. (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah. Berbeda dengan penelitian Prasetyoningrum (2018) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, komite audit, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan identitas etika pada perbankan syariah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan di atas pada uraian latar belakang, faktor-faktor tersebut masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Untuk itu peneliti memiliki motivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Identitas Etika Pada Bank Umum Syariah”. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan hasil yang lebih konsisten terhadap faktor penentu pengungkapan identitas etika dan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan identitas etika bank umum syariah?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan identitas etika bank umum syariah?
3. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan identitas etika bank umum syariah?
4. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan identitas etika bank umum syariah?

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan identitas etika bank umum syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis:

1. Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan identitas etika bank umum syariah
2. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan identitas etika bank umum syariah
3. Pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan identitas etika bank umum syariah
4. Pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan identitas etika bank umum syariah
5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan identitas etika bank umum syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai determinan yang memiliki pengaruh terhadap pengungkapan identitas etika. Serta dapat

digunakan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal identitas etika bank syariah.

b. Manfaat Praktis

1. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor mendapatkan gambaran yang transparan terhadap bank syariah sebagai sarana investasi.

2. Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perbankan syariah di Indonesia dalam meningkatkan pengungkapan identitas etika perusahaan sehingga dapat menjaga kepercayaan *stakeholders*.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi tambahan mengenai pengungkapan identitas etika pada bank syariah di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima pokok bahasan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan menjelaskan mengenai dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini, pembahasan beberapa hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, perumusan hipotesis serta menjelaskan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, operasional variabel penelitian, teknik analisis, uji hipotesis, serta analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai analisis terhadap data sampel, pengujian model, hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, kemudian saran yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai topik penelitian ini serta dapat membantu penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Stakeholders Theory*

Menurut Freeman *stakeholders* didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang dipengaruhi atau memiliki pengaruh pencapaian tujuan suatu organisasi. Rokhlinasari (2015) menjelaskan bahwa *stakeholder* dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan karakteristiknya: *Stakeholder* Primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer yaitu orang atau kelompok yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk bertahan, seperti investor, karyawan, dan lain-lain. *Stakeholder* sekunder yaitu mereka yang mempunyai keterkaitan dengan perusahaan tetapi tidak mempunyai hubungan langsung dengan transaksi. *Stakeholders theory* merupakan teori yang menjelaskan bahwa sebuah perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk memberikan informasi atas segala aktivitas yang dilakukan kepada *stakeholder* (Yaya, 2019). Oleh karena itu, suatu perusahaan tidak hanya bertindak untuk dirinya sendiri tetapi juga harus dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingannya. Hubungan yang baik tetap ada ketika pemangku kepentingan puas dengan pekerjaan manajemen.

Perbankan syariah menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam operasionalnya, sehingga akan melayani *stakeholdernya* untuk kepentingan terbaiknya dengan memberikan tingkat kepuasan tertentu. Dalam pengambilan keputusan, investor serta kreditur diharapkan untuk mendasarkan keputusan mereka tidak hanya pada informasi keuangan perbankan syariah, tetapi juga memasukkan

informasi mengenai identitas etika Islam. Dengan mengungkapkan identitas etika dari keyakinan perbankan syariah, dapat mengurangi ketidakpastian mengenai tindakan masa depan serta risiko jangka panjang. Etika yang baik mengarah pada eksternalitas positif seperti kepercayaan serta keterlibatan *stakeholder* (Khasanah & Amalia, 2021). Dukungan dari *stakeholder* sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan. Teori ini dapat diimplementasikan dengan melakukan pengungkapan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepuasan *stakeholder*, perbankan syariah harus bertanggung jawab untuk mengungkapkan identitas etisnya dalam laporan tahunannya. Dalam teori ini dijelaskan bahwa dengan adanya pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan pengungkapan identitas etika dapat dijadikan sarana untuk berdialog dengan para *stakeholder* dan diharapkan bisa menciptakan hubungan yang harmonis antar perusahaan dengan *stakeholdernya* karena keinginan mereka dapat terpenuhi.

2.1.2 Legitimacy Theory

Legitimacy theory adalah teori yang menganggap bahwa suatu perusahaan dapat terus beroperasi dan sejahtera jika bertindak sesuai dengan batasan serta norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Roklinasari (2015), teori ini merupakan teori yang menghubungkan perusahaan dengan masyarakat. *Legitimacy theory* didasarkan pada premis bahwa ada kontak sosial antara perusahaan dengan masyarakat, dan bahwa kontrak sosial adalah cara untuk menjelaskan ekspektasi masyarakat mengenai bagaimana perusahaan beroperasi. Harapan sosial ini tidak tetap tetapi berkembang seiring waktu, menuntut perusahaan untuk lebih tanggap terhadap lingkungan operasi. Teori ini juga mengatakan bahwa suatu

perusahaan tidak melakukan aktivitasnya sesuai dengan batasan dan norma yang berlaku di masyarakat, akan mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Dalam hal ini, masyarakat menekankan perusahaan untuk memenuhi harapan mereka (Murdiansyah, 2021).

Perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah dipengaruhi oleh aspek agama dalam setiap aktivitas bisnisnya. Artinya, Oleh karena itu, perbankan syariah harus selalu berpegang pada prinsip syariah dalam setiap aktivitas bisnisnya. Menurut Fathoni dkk. (2021), mengenai legitimasi, para ahli berpendapat bahwa legitimasi adalah amanah. Dengan kerangka operasional berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah telah berhasil mendapatkan legitimasi konsumen. Hal ini menjadi amanat langsung perbankan syariah ketika perusahaan tersebut tidak menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan batasan dan norma yang berlaku di masyarakat, akan mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja perbankan syariah.

Perbankan syariah dapat melakukan pengungkapan identitas etika pada laporan tahunan untuk menunjukkan ketaatan perbankan syariah pada prinsip syariah. Identitas etika dapat mencerminkan kondisi, sikap, serta komitmen perbankan syariah pada prinsip-prinsip syariah. Semakin tinggi pengungkapan identitas etika Islam maka menunjukkan semakin tingginya tingkat ketaatan perbankan syariah pada prinsip syariah. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah akan semakin meningkat dan dapat memberikan citra baik untuk perbankan syariah.

2.1.3 Perbankan Syariah

A. Pengertian Perbankan Syariah

Bank berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Terdapat empat jenis bank, yaitu bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat, serta bank syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 menjelaskan pengertian bank yaitu merupakan pelaku usaha yang menghimpun dana dari masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, himpunan dana dalam bentuk simpanan dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan/atau bentuk lain. Bank dibagi menjadi dua yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7, perbankan syariah merupakan perbankan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah.

B. Prinsip Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan perbankan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam, undang-undang serta fatwa yang dikeluarkan lembaga resmi. Perolehan, pengelolaan dan pengembangan kekayaan harus dilakukan menurut syariat Islam. Konsep syariah didasarkan pada pondasi kesejahteraan serta kebijaksanaan di dunia dan akhirat. Perbedaan utama dari bank konvensional yaitu perbankan syariah berpedoman pada nilai-nilai Islam yang jujur dan mendukung nilai-nilai sosial. Perbankan syariah di definisikan sebagai bank yang didirikan untuk beroperasi secara lebih adil

dalam konteks bisnis syariah serta untuk menyelaraskan dengan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Prinsip perbankan syariah dalam beroperasional telah diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Prinsip perbankan syariah yang diterapkan dalam penyaluran dana dibagi menjadi dua yaitu jual beli (*Ba'i*), sewa (*Al-Ijarah*), dan bagi hasil (*Syirkah*). Prinsip yang digunakan dalam jual beli (*Ba'i*) terdiri dari murabahah, salam, dan istishna. Sedangkan untuk bagi hasil (*Syirkah*) menggunakan prinsip musyarakah dan mudharabah. Adapun prinsip sharf dan wadiah yang digunakan perbankan syariah dalam melaksanakan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah.

C. Karakteristik Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah bank berdasarkan prinsip kemitraan, keadilan, transparansi, serta universalitas, dan melakukan kegiatan operasional perbankan berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Menurut Solihin (2001), perbankan syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Keuntungan dan bagi hasil yang disepakati pada akhir akad diwujudkan sebagai persentase bagi hasil dari total keuntungan, yang tidak kaku dan dapat dilakukan tanpa kompromi dalam kerangka yang dapat diterima.
2. Menggunakan persentase tetap dari total kewajiban pembayaran selalu dihindari karena persentase tersebut terikat dengan sisa hutang bahkan setelah batas kontrak berakhir. Sistem persentase memungkinkan peningkatan pendapatan bunga.

3. Mengenai akad pembiayaan proyek, perbankan syariah menahan diri untuk tidak menghitung nominal pembiayaan tertentu, karena keuntungan atau kerugian proyek yang dibiayai bank umumnya baru diketahui setelah proyek selesai.
4. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki tugas mengendalikan operasional bank dari sudut pandang syariah.
5. Terdapat produk pembiayaan gratis yang murni bersifat sosial yang ditujukan untuk orang miskin atau masyarakat yang membutuhkan kegiatan keagamaan. Pembiayaan ini bersumber dari zakat, sedekah, serta pendapatan tidak halal dari transaksi dengan bank yang menerapkan sistem bunga.

2.1.4 Corporate Ethical Identity

Identitas korporat adalah identitas yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan citra yang mencerminkan kepribadian perusahaan. Menurut Vera & Davidovic (2011), tujuan dari konsep ini adalah untuk menggambarkan pembentukan individu dan karakteristik perusahaan sehingga dapat membedakan dirinya dari perusahaan lain. Identitas perusahaan merupakan realitas dan keunikan perusahaan yang berkaitan dengan citra serta reputasi perusahaan melalui komunikasi perusahaan yang baik secara internal maupun eksternal (Khasanah & Amalia, 2021). Oleh karena itu, identitas etika suatu perusahaan dalam persaingan dengan perusahaan lain dituntut untuk menjadi faktor penting dalam strategi komunikasi perusahaan, karena mencerminkan rencana bisnis yang matang. Identitas perusahaan yang baik yaitu

yang konsisten dengan strategi dan rencana perusahaan, sehingga membentuk persepsi masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap perusahaan atau produknya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa identitas perusahaan mencerminkan reputasi perusahaan.

Etika merupakan nilai yang dianut oleh golongan atau masyarakat mengenai benar dan salah. Ini menjelaskan bahwa etika merupakan nilai dan norma yang dijadikan pegangan dalam mengatur tingkah laku seseorang atau suatu kelompok tertentu (Bertens, 1993). Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang senantiasa mengedepankan nilai etika dalam bisnis. Menurut Khasanah & Amalia (2021), perbankan syariah harus memiliki identitas perusahaan, terutama dalam hal identitas etika berdasarkan prinsip syariah, karena dasar filosofi bisnisnya terkait erat dengan agama. Dalam Islam, etika berlaku untuk semua aspek kehidupan. Standar, kode etik serta moralitas bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadist. Identitas etika dipahami sebagai status perusahaan dengan karakteristik khusus sejalan dengan etika atau moral Islam, yang tercermin dalam segala aktivitas operasional dan pelaporan perusahaan. Nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip syariah harus menjadi identitas utama perbankan syariah. Identitas etika merupakan cerminan perilaku perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya yang berlandaskan prinsip syariah. Untuk mendapatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat, perbankan syariah harus dapat mempertahankan identitas utamanya sebagai perbankan yang segala operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Fitria & Sulhani, 2021).

Haniffa & Hudaib (2007), menetapkan tolak ukur identitas etika untuk perbankan syariah yang digunakan untuk menilai sejauh mana perbankan syariah melaporkan identitas etis mereka dalam laporan tahunan mereka, yaitu *Ethical Identity Index* (EII). *Ethical Identity Index* (EII) adalah metode untuk mengevaluasi perbandingan antara informasi yang diungkapkan dan informasi berdasarkan nilai-nilai etika Islam dalam laporan tahunan perbankan syariah. Acuan identitas etika yang dikemukakan oleh Haniffa & Hudaib (2007) adalah sebagai berikut:

1. Nilai dan filosofi yang mendasari

Nilai dan filosofi yang mendasari perbankan syariah yaitu aturan syariah dan operasi etis dengan tambahan fungsi sosial. Kegiatan operasional perbankan syariah seperti kegiatan pembiayaan, investasi dan bagi hasil harus berdasarkan prinsip syariah Al-Quran dan Al-Hadist. Dengan menerbitkan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, kelompok kepentingan harus lebih percaya diri untuk menginvestasikan uang atau modal mereka di perbankan syariah. Selain itu, perbankan syariah harus mengungkapkan semua aspek tata kelola perusahaan yang baik, profil manajemen, dan lain sebagainya. Hal ini harus didukung oleh seluruh elemen perbankan syariah, sehingga nilai dan filosofi yang mendasari perbankan syariah dapat diwujudkan dengan baik.

2. Penyediaan produk dan jasa tanpa bunga

Prinsip syariah melarang pengguna untuk membuat kontrak dan transaksi jual beli, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. Salah satu bentuk riba adalah suku bunga yang ditawarkan oleh bank. Bunga bank

melanggar prinsip syariah karena ada penambahan pinjaman atau biaya tambahan yang mengakibatkan eksploitasi kedua belah pihak. Oleh karena itu, perbankan syariah harus mengungkapkan sejauh mana produk dan layanan yang ditawarkan bebas bunga atau riba, sesuai dengan hukum syariah, dan telah dinilai oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

3. Batasan kesepakatan atas transaksi yang sesuai prinsip syariah

Perbankan syariah harus berusaha menghindari transaksi spekulatif atau risiko berlebihan seperti berinvestasi di pasar berjangka, karena konsekuensinya tidak diketahui (*gharar*). Transaksi dengan akad yang sah merupakan salah satu hal terpenting bagi perbankan syariah, karena sebagian besar operasinya terkait dengan transaksi dan layanan keuangan. Oleh karena itu, dalam cita-cita identitas etika Islam, informasi mengenai mekanisme transaksi harus jelas serta mencakup jenis akad yang digunakan.

4. Fokus pada tujuan pembangunan dan sosial

Perbankan syariah diharapkan lebih bertanggung jawab secara sosial daripada perbankan konvensional karena Islam menghargai keadilan sosial. Tanggung jawab perbankan syariah adalah menyalurkan zakat, shodaqoh dan zakat untuk kemajuan perekonomian. Selain itu, perbankan syariah juga harus memperhatikan peningkatan kesejahteraan karyawan.

5. Review Dewan Pengawas Syariah

Setiap perbankan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memastikan bahwa perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dipilih dari

kalangan Ulama yang memahami Fiqih Muamalah serta keuangan atau perbankan pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan kelima nilai tersebut, menurut Gadhoom dkk. (2022), maka dijabarkan dalam 42 (empat puluh dua) poin penilaian yang harus diungkapkan oleh perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Ethical Identity Index (EII)

A	Dewan Pengawas Syariah (DPS)
1	Profil anggota DPS
2	Remunerasi anggota DPS
3	Jumlah pertemuan yang diadakan
4	Laporan DPS telah disediakan
5	Pengungkapan/deskripsi transaksi yang melanggar
6	Rekomendasi untuk memperbaiki cacat pada produk
7	Tindakan yang diambil oleh manajemen atas produk cacat
8	Persentase keuntungan dari kegiatan yang tidak diizinkan
9	Bagaimana bank membuang/berniat membuang pendapatan tersebut
10	Pengungkapan alasan untuk melakukan transaksi yang melanggar hukum
B	Visi dan Misi
11	Memberikan imbal hasil dalam cita-cita Syari'ah
12	Terlibat dalam kegiatan pembiayaan dan investasi sesuai dengan aturan pembagian risiko
13	Memenuhi hubungan kontraktual dengan berbagai pemangku kepentingan melalui "pernyataan kontrak"
14	Pernyataan apresiasi kepada pemangku kepentingan
C	Board Of Director (BOD) dan Management
15	Nama, posisi, dan gambar anggota dewan dan manajemen puncak
16	Profil anggota dewan dan manajemen puncak sebagai indikator pengetahuannya di perbankan syariah
17	Aspek tata kelola yang baik: memiliki komite audit, jabatan direktur terbatas dan kepemilikan saham
18	Apakah manajer menerima gaji terkait keuntungan
D	Kesadaran Syariah
19	Tidak ada keterlibatan dalam kegiatan yang tidak diizinkan
20	Keterlibatan dalam kegiatan yang tidak diizinkan
21	Alasan keterlibatan dalam kegiatan yang tidak diizinkan
22	Persetujuan ex ante oleh DPS untuk produk baru
E	Social Commitments Zakat
23	Apakah bank diharuskan membayar zakat?
24	Jika ya, apakah bank membayar zakat?

25	Jika tidak, jumlah yang jatuh tempo dalam saham dan deposito
26	Pengesahan DPS bahwa sumber dan penggunaan zakat menurut Syariah
27	Pengesahan DPS bahwa zakat telah dihitung menurut syariah
	Pinjaman yang Baik Hati (Qard Hasan)
28	Apakah bank membiayai Qard Hasan?
29	Sumber dana Qard Hasan
30	Kebijakan penyediaan Qard Hasan
	Komitmen Terhadap Karyawan
31	Kesejahteraan dan tunjangan karyawan
32	Pelatihan dan pengembangan
	Komitmen Terhadap Debitur
33	Kebijakan dalam berurusan dengan klien yang bangkrut
34	Jumlah yang dibebankan sebagai denda keterlambatan
35	Bagaimana bank menangani hukuman seperti itu
	Komitmen Terhadap Environment
36	Sifat Donasi untuk melindungi lingkungan
37	Jumlah yang disumbangkan untuk melindungi lingkungan
38	Pernyataan kebijakan lingkungan
F	Etika
39	Apakah organisasi mematuhi kode etik perilaku
40	Apakah kode etik ini spesifik untuk sektor perilaku
41	Apakah karyawan dilatih dalam kebijakan etis
42	Kebijakan dan mekanisme kepatuhan untuk privasi konsumen

2.1.5 Corporate Governance

2.1.5.1 Pengertian Corporate Governance

Corporate Governance atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tata kelola perusahaan memiliki arti yaitu sistem perlindungan dan budaya struktural dan prosedural yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan bertindak demi kepentingan jangka panjang terbaik untuk pemangku kepentingan mereka (Khasanah & Amalia, 2021). Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai sistem yang memungkinkan operasi organisasi diatur dan dikendalikan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (Nazaruddin, 2008). Tata kelola perusahaan penting bagi semua perusahaan, terutama perbankan syariah. Hal ini

dikarenakan institusi memiliki dimensi moral dalam transaksinya. Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 merupakan peraturan yang dimiliki Pemerintah Indonesia yang berfungsi untuk mengatur perbankan syariah untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Tidak hanya berfungsi untuk membangun perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan, namun juga bertujuan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan nilai-nilai etika yang berlaku pada sektor perbankan syariah (Khasanah & Amalia, 2021).

2.1.5.2 Prinsip *Corporate Governance*

Perbedaan utama yang memisahkan manajemen perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam yang harus dipatuhi oleh perbankan syariah. Menurut Suwandi dkk. (2018), Penerapan *corporate governance* yang baik di perbankan syariah didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu:

1. *Transparency* (Transparansi)

Transparansi merupakan keterbukaan dalam perusahaan untuk melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan bahan serta informasi material mengenai perusahaan. Prinsip transparansi dalam penyelenggaraan perusahaan adalah tersedianya pengungkapan yang terkini dan informasi yang jelas serta dapat diperbandingkan mengenai hasil keuangan perusahaan, kepengurusan dan struktur kepemilikan. Hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat tentang keadaan perusahaan, karena dapat terlibat

dalam pengambilan keputusan tentang perubahan mendasar dalam perusahaan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Accountability atau Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan serta pertanggungjawaban kelembagaan perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan efektif. Akuntabilitas berarti menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, dewan, pemegang saham, dan auditor. Kejelasan proses, struktur, sistem, serta tanggung jawab pengoperasian fasilitas perusahaan harus diatur secara tepat, terukur dan sesuai dengan kepentingan para pemangku kepentingan sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efektif.

3. *Responsibility* (Responsibilitas)

Responsibilitas yaitu tanggung jawab terletak pada kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perusahaan serta praktik bisnis yang sehat. Kepatuhan dalam manajemen terhadap prinsip bisnis yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga harus memikul tanggung jawab yang berkaitan dengan masyarakat serta lingkungan sehingga kelangsungan usaha dapat dipraktikkan dalam jangka panjang dan diakui sebagai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

4. *Independency* (Independensi)

Independensi yaitu keadaan dimana operasional perusahaan dijalankan tanpa benturan kepentingan serta tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing lembaga perusahaan tidak dapat saling mengontrol serta tidak dapat dihalangi oleh pihak lain. Asas ini memastikan bahwa setiap organ perusahaan menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan pasal-pasal konstitusi serta peraturan perundang-undangan tidak saling mengatur dan saling bertanggungjawab, sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif dan perusahaan dapat terhindar dari berbagai permasalahan sehingga operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dinamis.

5. *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan)

Fairness atau kewajaran adalah pemerataan dalam melaksanakan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, Kewajaran dan Kesetaraan adalah perlakuan yang adil dan setara dalam mewujudkan hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini harus memastikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak terkait, terutama pemegang saham minoritas dan asing.

2.1.5.3 Struktur *Corporate Governance*

2.1.5.3.1 Dewan Direksi

Dewan direksi didefinisikan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai badan hukum yang mempunyai kuasa dan tanggung jawab penuh untuk mengurus perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan tujuan

perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar perusahaan. dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perbankan syariah sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah (Peraturan Bank Indonesia No. 11 Tahun 2009). Susunan administrasi jumlah anggota dewan direksi diatur dalam Surat Edaran Otoritas Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014, yang menyebutkan bahwa sedikitnya ada tiga orang yang disebut sebagai anggota dewan direksi (Khasanah & Amalia, 2021).

2.1.5.3.2 Dewan Komisaris

Tugas dewan komisaris yaitu melakukan pengawasan terhadap perusahaan pada umumnya dan/atau pada khususnya sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Menurut Rahman dkk (2016), dewan komisaris termasuk bagian penting dari tata kelola perusahaan dan bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengarahkan organisasi untuk memastikan pengelolaan organisasi dilakukan dengan baik. Aspek penting dari mekanisme ini adalah jumlah dewan komisaris. Sesuai Surat Edaran Lembaga Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014, jumlah minimal anggota adalah tiga orang serta maksimal sama dengan jumlah anggota dewan direksi (Khasanah & Amalia, 2021).

2.1.5.3.3 Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11 Tahun 2009, Dewan pengawas syariah yaitu dewan yang bertugas memberikan nasihat serta saran kepada dewan direksi dan memantau apakah semua kegiatan perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi utama dewan pengawas syariah adalah untuk meninjau dan mengontrol aspek keagamaan dari transaksi, layanan dan

produk perbankan syariah. Dewan pengawas syariah memiliki peran yang sama dengan komite audit dan auditor eksternal. Anggota dewan pengawas syariah juga harus memiliki jumlah anggota minimum dan kualifikasi tertentu untuk mendukung efektivitas penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. Sesuai Surat Edaran Lembaga Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014, jumlah anggota dewan pengawas syariah paling sedikit dua orang atau maksimal lima puluh persen dari jumlah anggota dewan. Selain itu, ditegaskan bahwa paling sedikit harus terdapat satu orang dalam fungsi kepatuhan serta satu orang dalam internal audit yang mengetahui dan/atau memahami perbankan syariah (Khasanah & Amalia, 2021).

2.1.5.3.4 Komite Audit

Komite audit dibentuk untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan yang sekuritasnya diperdagangkan secara publik. Dalam sistem tata kelola perusahaan, dewan komisaris bertanggung jawab membentuk komite audit. Oleh karena itu, peran ketua komite audit biasanya dilakukan oleh dewan yang merupakan pihak independen. Selain itu, Surat Edaran Lembaga Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 mensyaratkan komposisi komite audit harus mencakup pihak independen yang ahli di bidang pengelolaan keuangan dan pihak independen yang ahli di bidang perbankan syariah (Khasanah & Amalia, 2021).

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yaitu tingkat kesadaran akan ukuran perusahaan. ukuran perusahaan mencerminkan kondisi dari perusahaan. Perusahaan besar cenderung melakukan lebih banyak aktivitas dan berdampak besar pada pemangku kepentingan mereka. Perusahaan dengan potensi yang besar permintaan publiknya

mengenai informasi lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan maka informasi perusahaan yang tersedia bagi para pemangku kepentingan semakin banyak (Prasetyoningrum, 2018). Karena perbankan syariah memiliki pemangku kepentingan yang sebagian besar beragama Islam, mereka harus mencatat informasi tentang aktivitas di tempat mereka berinvestasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berfokus pada pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan identitas etika bank umum syariah. Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini dengan membahas penelitian-penelitian sejenis yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini serta untuk menghindari terjadinya pembahasan yang sama dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rashidah Abdul Rahman, Nur Syatilla Saimi, dan Bello Lawal Danbatta (2016)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan Direksi • Dewan Komisaris Independen • Dewan Pengawas Syariah • Pemegang Rekening Investasi <p>Variabel Dependen:</p> <p>Pengungkapan identitas etis</p>	Bank syariah yang beroperasi di Bahrain dan Malaysia pada periode 2007-2011	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan Direksi secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan di bank syariah • Dewan Pengawas Syariah secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan di bank syariah • Pemegang Rekening Investasi secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan di bank syariah • Dewan komisaris independen tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan sosial
2	Ari Kristin Prasetyonigrum (2020)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Perusahaan • Profitabilitas • Leverage • Efisiensi Biaya • Umur Perusahaan <p>Variabel Dependen:</p>	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. • Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. • Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR. • Efisiensi Biaya tidak berpengaruh

No	Peneliti	Variabel	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
		Pengungkapan identitas etis		<p>signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umur Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR.
3	Elis Mediawat Dan Indria Fitri Afiyana (2018)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Pengawas Syariah <p>Variabel Dependen:</p> <p>Pengungkapan sukarela</p>	Bank umum syariah di Indonesia pada periode 2013-2016.	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan syariah pada laporan tahunan
4	Ain Hajawiya h, Dodik Siswantor, Miranti Kartika Dewi (2019)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran • umur bank • Profitabilitas • Ukuran Dewan Pengawas Syariah <p>Variabel Dependen:</p> <p>Pengungkapan Islamic Social Reporting</p>	Bank syariah di Indonesia dan Malaysia pada periode 2013-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran dan umur bank berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR. • Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan ISR, • Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR.
5	Siti Rokhaniyah (2020)	<p>Variabel Independen:</p>	Bank Umum Syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif

No	Peneliti	Variabel	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Manajerial • Dewan Komisaris • Komite Audit • Komite Nominasi dan Remunerasi • Komite Tata Kelola Terintegrasi • Komite Tata Kelola Perusahaan • Komite Manajemen Risiko • Komite Pemantau Risiko • Kepemilikan Institusi <p>Variabel Dependen: Pengungkapan sukarela</p>	<p>Pada periode 2016-2019.</p>	<p>terhadap tingkat pengungkapan sukarela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela • Komite Audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela • Komite Nominasi dan Remunerasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela • Komite Tata Kelola Terintegrasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela • Komite Manajemen Risiko berdampak negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela • Komite Pemantau Risiko berdampak negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela • Komite Tata Kelola Perusahaan tidak memiliki efek terhadap tingkat pengungkapan sukarela • Kepemilikan Institusi tidak memiliki efek terhadap tingkat pengungkapan sukarela

No	Peneliti	Variabel	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
6	Mohd Shukor Harun, Khaled Hussainey, Khairul Ayuni Mohd Kharuddin, Omar Al Farooque (2020)	Variabel Dependen: Pengungkapan CSR	Bank Syariah dari 6 negara (Bahrain, Qatar, Kuwait, KSA, Oman, UAE) pada periode 2010-2014	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR • Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR • Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR • Dualitas CEO berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR • Nilai Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR
7	Md Abu Jahid, Md Harun Ur Rashid, Syed Zabid Hossain, Siswoyo Haryono, Bambang Jatmiko (2020)	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan Direksi • Dewan Komisaris Independen • Ukuran Komite Audit • Anggota Dewan Perempuan • Direktur Asing • Direktur Politik • Direktur Asing Variabel Independen: Pengungkapan CSR	Bank Publik di Bangladesh pada periode 2013-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan Direksi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap CSR • Dewan Komisaris Independen memiliki dampak positif yang signifikan terhadap CSR • Ukuran Komite Audit memiliki dampak negatif terhadap CSR • Anggota Dewan Perempuan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap CSR • Direktur Asing memiliki dampak positif yang signifikan terhadap CSR • Direktur Politik memiliki dampak negatif terhadap CSR

No	Peneliti	Variabel	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
8	Hidayah Fazrin Milenia, Ade Wirman Syafei (2021)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan Direksi • Ukuran Dewan Komisaris • Ukuran Dewan Pengawas Syariah <p>Variabel Dependen: Pengungkapan Islamic Social Reporting</p>	Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia pada periode 2016-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan Direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting • Ukuran Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting • Ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting
9	Isnan Murdiansyah (2021)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leverage • Ukuran Dewan Komisaris • Dewan Pengawas Syariah <p>Variabel Dependen: Pengungkapan Islamic Social Reporting</p>	Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2017-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting • Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting • Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting

No	Peneliti	Variabel	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
10	Erlinda Nur Khasanah dan Wia Rizqi Amalia (2021)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan Komisaris • Ukuran Komite Audit • Ukuran Dewan Direksi • Ukuran Dewan Pengawas Syariah <p>Variabel Dependen: Pengungkapan identitas etis</p>	Bank syariah di Indonesia pada periode 2013-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan Komisaris secara signifikan mempengaruhi pengungkapan identitas etis • Ukuran Komite Audit secara signifikan mempengaruhi pengungkapan identitas etis • Ukuran Dewan Direksi tidak memiliki pengaruh signifikan pada pengungkapan identitas etis • Ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada pengungkapan identitas etis
11	Ervina Tri P1, Nugroho Heri Pramono (2022)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • Dewan Komisaris Independen • Ukuran Perusahaan • Kecukupan Modal • Islamic Governance Score <p>Variabel Dependen: Pengungkapan Islamic Social Reporting</p>	Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2017-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting • Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting • Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting • Kecukupan Modal tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting • Islamic Governance Score berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting

No	Peneliti	Variabel	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
12	Fatima Al Maeeni, Nejla Ould Daoud Ellili and Haitham Nobanee (2022)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan Direksi • Dewan Komisaris Independen • Anggota Dewan Perempuan • Kepemilikan Manajerial • Kepemilikan Instiusional • Kepemilikan Asing • Ukuran Bank • Leverage <p>Variabel Dependen:</p> <p>Pengungkapan CSR</p>	Bank Syariah (Dubai Islamic Bank, Abu Dhabi Islamic Bank dan Emirates Islamic Bank) dan Bank Konvensional, pada periode 2009-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan Direksi memiliki dampak positif pada Pengungkapan CSR • Dewan Komisaris Independen memiliki dampak positif pada Pengungkapan CSR • Anggota Dewan Perempuan memiliki dampak positif pada Pengungkapan CSR • Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR • Kepemilikan Instiusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR • Kepemilikan Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR • Ukuran Bank berdampak positif terhadap pengungkapan CSR • Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR
13	Rizwan Ali, Ramiz Ur Rehman, Madiha Kanwal, Muhammad Akram Naseem and	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan Direksi • Direktur Asing 	Bank di Pakistan pada periode 2008-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR • Direktur Asing secara signifikan berdampak positif terhadap pengungkapan CSR

No	Peneliti	Variabel	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
	Muhammad Ishfaq Ahmad (2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Wanita di Dewan • ROE • Likuiditas <p>Variabel Dependen: Pengungkapan CSR</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Wanita di Dewan secara signifikan berdampak positif terhadap pengungkapan CSR • ROE secara signifikan berdampak positif terhadap pengungkapan CSR • Likuiditas yang secara signifikan mempengaruhi pengungkapan CSR

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Identitas

Etika Bank Syariah

Dewan direksi termasuk salah satu bagian terpenting dari manajemen dan perannya adalah untuk memantau serta mengendalikan organisasi untuk memastikan bahwa manajemen mengarahkan organisasi dengan benar. Dalam *Stakeholders theory*, ukuran dewan direksi yang besar akan meningkatkan kemampuan pemantauan dewan karena hubungan yang signifikan antara organisasi dan *Stakeholders* cenderung meningkatkan tingkat pengungkapan yang lebih besar serta menghasilkan lebih banyak informasi. Tanggungjawab serta tugas dewan direksi sangat mempengaruhi keputusan *stakeholder*, sehingga dalam tata kelola perusahaan antara organ satu dengan lainnya kerjasama sangat dibutuhkan dalam memberikan pengungkapan identitas etika sehingga perusahaan mendapatkan kepercayaan dari para stakeholder (Rahman dkk., 2016). Penelitian terdahulu oleh Rahman dkk. (2016) ukuran dewan direksi secara signifikan mempengaruhi

pengungkapan identitas etika pada bank syariah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rizwan dkk. (2022) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian ini yaitu:

H1: Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah

2.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Identitas

Etika Bank Syariah

Menurut Rahman dkk. (2016) Dewan komisaris adalah badan pengawas utama untuk operasional perusahaan, maka dari itu dewan komisaris memiliki tempat penting dalam manajemen perusahaan. Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar diberikan pada kesesuaian jumlah anggotanya. Jumlah dewan komisaris yang lebih banyak memiliki pengaruh yang lebih baik terhadap hubungan masyarakat di perusahaan perbankan. Semakin besar jumlah anggota yang diberi wewenang, maka semakin mudah untuk mengontrol CEO (manajemen puncak) dan semakin efektif pemantauannya (Khasanah & Amalia, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang lebih besar mengungkapkan lebih banyak informasi daripada jumlah anggota yang lebih sedikit. Diharapkan juga dengan jumlah anggota yang lebih banyak, perbankan syariah akan dapat mengungkapkan informasi lengkap mengenai identitas etikanya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rokhaniyah (2020) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah, penelitian tersebut didukung oleh penelitian Murdiansyah (2021) ukuran dewan komisaris

berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian ini yaitu:

H2: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah

2.3.3 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Identitas Etika Bank Syariah

Dewan pengawas syariah merupakan salah satu divisi dalam perbankan syariah yang dianggap penting untuk tingkat pengungkapan perbankan syariah. Dewan pengawas syariah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perbankan syariah beroperasi sesuai dengan etika serta prinsip syariah. Sebagai pengurus perbankan syariah, dewan pengawas syariah bertanggungjawab mengarahkan dan mengendalikan jalannya organisasi sehingga kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Kepatuhan syariah tidak hanya bergantung pada memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah melalui laporan dewan pengawas syariah, tetapi juga pada partisipasi yang lebih luas dalam kegiatan masyarakat serta hubungan masyarakat (Rahman dkk., 2016). Khasanah & Amalia (2021) menyatakan bahwa jumlah anggota dewan pengawas syariah menentukan tingkat pengungkapan identitas etika perbankan syariah. Penambahan anggota akan meningkatkan pengawasan dan memperkuat kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah. Semakin banyak jumlah anggota dewan pengawas syariah maka semakin besar tingkat pengungkapan perbankan syariah, karena kemampuan dewan pengawas syariah dalam mengontrol manajemen juga meningkat. Rahman et al. (2016) melakukan penelitian yang hasilnya menyatakan ukuran dewan pengawas

syariah secara signifikan mempengaruhi pengungkapan identitas etika pada bank syariah. Penelitian yang dilakukan Milenia & Syafei (2021) juga mendukung pernyataan dari tersebut, bahwa ukuran dewan pengawas syariah secara signifikan mempengaruhi pengungkapan identitas etika pada bank syariah. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian ini yaitu:

H3: Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah

2.3.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Identitas Etika Bank Syariah

Komite audit memegang peranan penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Setiap perusahaan harus memiliki komite audit untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Adanya komite audit bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan publisitas perusahaan. Keberadaan komite audit dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengungkapan perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota komite Audit, semakin efektif peran komite audit dalam mengarahkan serta mengawasi manajemen puncak. Semakin banyak pula komite audit yang mencoba menghadirkan perspektif, keterampilan dan pengetahuan yang berbeda untuk memastikan pengawasan yang efektif (Khasanah & Amalia, 2021). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rokhaniyah (2020) menyatakan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah, hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Khasanah & Amalia (2021) ukuran komite audit berpengaruh

positif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian ini yaitu:

H4: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah

2.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Identitas Etika Bank Syariah

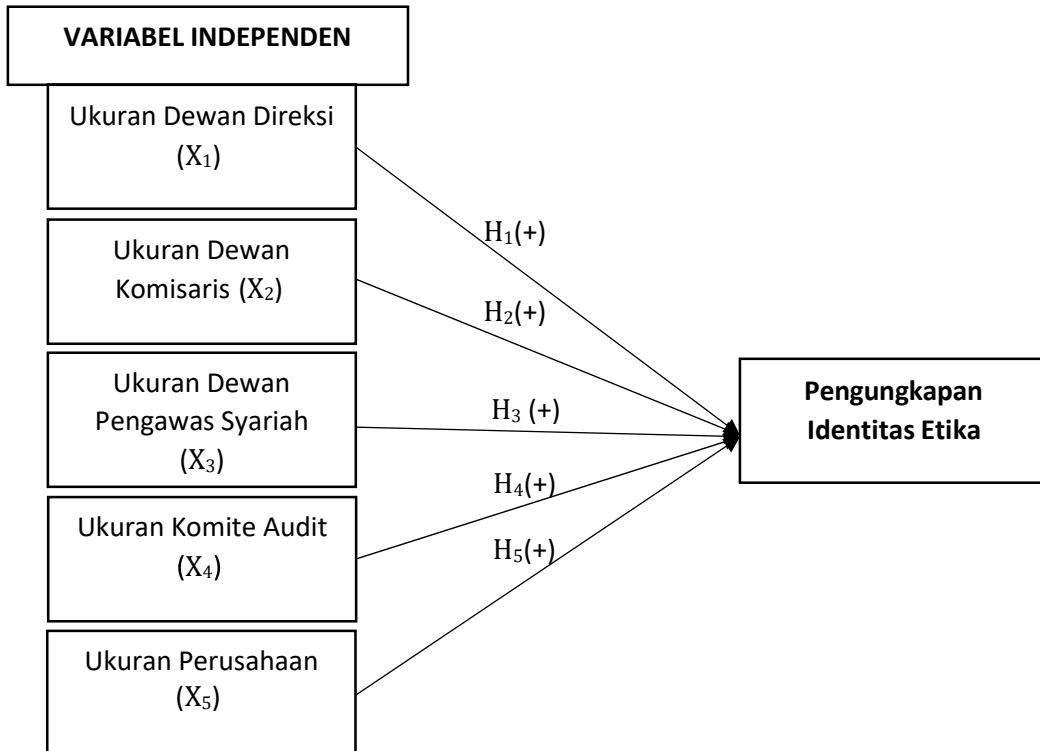
Ukuran perusahaan yaitu tingkat kesadaran akan ukuran perusahaan. Berdasarkan teori legitimasi, dijelaskan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki risiko kerusakan yang lebih tinggi dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, perusahaan besar termotivasi menggunakan legitimasi dengan mengungkapkan lebih banyak informasi daripada perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang sering digunakan perusahaan untuk menguji tingkat pengungkapan yang relevan. Perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak aktivitas dan berdampak besar pada pemangku kepentingan mereka. Perusahaan besar umumnya membutuhkan lebih banyak informasi publik daripada perusahaan kecil. Hal ini disebabkan, banyaknya jumlah *stakeholders* pada perbankan syariah adalah mayoritas beragama islam dimana mereka memiliki kebutuhan pemenuhan informasi kegiatan yang ada pada tempat dimana mereka berinvestasi (Ervina & Pramono, 2022). Melakukan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial secara Islami adalah cara untuk memenuhi kebutuhan spiritual perusahaan, tidak hanya kepada *stakeholdernya* tetapi juga kepada Allah SWT. Perbankan syariah dapat melakukan pengungkapan identitas etika pada laporan tahunan untuk menunjukkan ketaatan perbankan syariah pada prinsip syariah. Identitas etika dapat

mencerminkan kondisi, sikap, serta komitmen perbankan syariah pada prinsip-prinsip syariah. Semakin tinggi pengungkapan identitas etika Islam maka menunjukkan semakin tingginya tingkat ketaatan perbankan syariah pada prinsip syariah. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah akan semakin meningkat dan dapat memberikan citra baik untuk perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Tri & Pranomo (2022) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah, yang didukung oleh penelitian yang dilakukan Al Maeeni dkk. (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian ini yaitu:

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Model Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh variabel independen berupa dewan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan identitas etika. Perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi fokus dalam penelitian ini, khususnya pada tahun 2017 sampai 2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2017 sampai 2021. Pada penelitian ini sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2017 sampai 2021.
2. Perusahaan perbankan syariah yang secara berkala mempublikasikan laporan tahunan dari tahun 2017 sampai 2021.

3. Data-data yang dibutuhkan atas variabel-variabel yang akan diteliti tersedia dalam laporan tahunan masing-masing perusahaan perbankan syariah tahun periode 2017 sampai 2021.

Pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan sampel. Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, maka terpilih 13 Bank Umum Syariah di Indonesia yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Adapun tiga belas bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Bank Umum Syariah

No	Nama Bank
1	Bank Aceh Syariah
2	Bank BCA Syariah
3	Bank BJB Syariah
4	Bank BNI Syariah
5	Bank BRI Syariah
6	Bank BTPN Syariah
7	Bank Bukopin Syariah
8	Maybank Syariah Indonesia
9	Bank Mandiri Syariah
10	Bank Mega Syariah
11	Bank Muamalat Indonesia
12	Bank Panin Syariah
13	Bank Victoria Syariah

3.3 Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk laporan keuangan tahunan dalam tahun periode 2017 sampai 2021 yang

ada pada Bank Umum Syariah yang diperoleh dari *website* masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia.

3.4 Operasional Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, ada tiga variabel yang digunakan, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

3.4.1 Variabel Dependen

Penelitian ini menggunakan metode *Ethical identity index* (EII), yang merupakan metode penilaian pengungkapan identitas etika perbankan syariah dalam menjalankan operasional bisnis sesuai dengan prinsip syariah (Haniffa & Hudaib, 2017). Teknik analisis konten diterapkan pada informasi yang diberikan dalam laporan tahunan untuk mengidentifikasi item yang diperlukan untuk mengukur pengungkapan identitas etika perbankan syariah. Informasi kualitatif dalam laporan tahunan diubah menjadi data kuantitatif untuk memudahkan pengukuran tingkat pengungkapan. Prosedur dikotomis dengan cara item skor satu “1” jika diungkapkan dalam laporan tahunan dan skor nol “0” jika tidak diungkapkan dalam laporan tahunan (Gadhoom dkk., 2022). *Ethical Identity Index* (EII) dirumuskan sebagai berikut:

$$EII_j = \frac{\sum_{t=1}^{n_j} X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

EII_j : Ethical identity index

X_{ij} : Skor 1 jika item diungkapkan atau pada tahun ke i konstruk dan skor 0 jika tidak diungkapkan

N_j : Jumlah item n atau jumlah konstruk yang diungkapkan oleh bank j

3.4.2 Variabel Independen

3.4.2.1 Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi merupakan total anggota direksi dari masing-masing Bank Umum Syariah yang perhitungannya diukur dengan cara menghitung jumlah anggota dewan direksi yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan Bank Umum Syariah.

$$\text{Jumlah Dewan Direksi (SIZE)} = \sum \text{Anggota Dewan Direksi}$$

3.4.2.2 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan total anggota Direksi dari masing-masing Bank Umum Syariah yang perhitungannya diukur dengan cara menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan Bank Umum Syariah.

$$\text{Jumlah Dewan Komisaris (SIZE)} = \sum \text{Anggota Dewan Komisaris}$$

3.4.2.3 Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Ukuran dewan pengawas syariah merupakan total anggota dewan Pengawas syariah dari masing-masing Bank Umum Syariah yang perhitungannya diukur

dengan cara menghitung jumlah anggota dewan pengawas syariah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan Bank Umum Syariah.

$$\text{Jumlah Dewan Pengawas Syariah (SIZE)} = \sum \text{Anggota Dewan Pengawas Syariah}$$

3.4.2.4 Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit merupakan total anggota komite audit dari masing-masing Bank Umum Syariah yang perhitungannya diukur dengan cara menghitung jumlah anggota komite audit yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan Bank Umum Syariah.

$$\text{Jumlah Komite Audit (SIZE)} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

3.4.2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan gambaran apakah perusahaan tersebut tergolong sebagai perusahaan besar atau kecil. Perhitungan untuk mengukur ukuran perusahaan yaitu dengan cara melihat total aset Bank Umum Syariah atau kapitalisasi pasar yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan Bank Umum Syariah.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

3.5 Teknik Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Untuk mengetahui sebaran nilai variabel penelitian dilakukan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif mengkaji nilai rata-rata, median, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi yang digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai variabel yang diteliti, yaitu dewan direksi, dewan

komisaris, dewan pengawas syariah, komite audit, ukuran perusahaan, dan pengungkapan identitas etika.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data sudah memenuhi asumsi klasik dan apakah bisa di aplikasikan pada model regresi. Pengujian ini dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Maka dilakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi agar data memenuhi asumsi klasik.

3.5.2.1 Uji Normalitas Data

Uji untuk mengetahui apakah residual suatu model regresi berdistribusi dengan normal atau tidak disebut dengan uji normalitas. Karena dikatakan baik jika model regresi berdistribusi normal. Untuk menentukan normalitas data maka uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika data menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05, maka data terdistribusi normal. Namun jika data menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05, maka data terdistribusi tidak normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah terjadi multikolinier atau tidak antara variabel independen, serta untuk melihat apakah ditemukan korelasi tinggi serta sempurna pada regresi. Pengujian ini dilihat menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 , maka menunjukkan adanya multikolinearitas antar variabel independen. Namun, apabila nilai *tolerance*

$\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$, maka menunjukkan tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen, maka model regresi bisa dikatakan baik.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan pada varian residual pengamatan dalam model regresi. Apabila nilai signifikansi residual variabel independen diatas 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun apabila nilai signifikansi residual variabel independen dibawah 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu di periode t dengan kesalahan pengganggu di periode t-1 dalam model regresi linier yang terjadi sebelumnya. Pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson (Uji DW). Model regresi yang baik yaitu regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Tidak terdapat autokorelasi jika $dU < DW < 4-dU$

3.6 Uji Hipotesis dan Analisis Data

3.6.1 Analisis Data

3.6.1.1 Regresi Linear Berganda

Karena pada penelitian ini variabel independen yang digunakan lebih dari satu, maka analisis data yang digunakan untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan identitas etika pada penelitian ini yaitu analisis linear berganda. Faktor-faktor tersebut yaitu dewan direksi, dewan komisaris, dewan

pengawas syariah, komite audit, dan ukuran perusahaan. Maka persamaan regresi berganda yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

- Y = Pengungkapan Identitas Etika
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- X₁ = Ukuran Dewan Direksi
- X₂ = Ukuran Dewan Komisaris
- X₃ = Ukuran Dewan Pengawas Syariah
- X₄ = Ukuran Komite Audit
- X₅ = Ukuran Perusahaan
- e = *Error term*

3.6.2 Uji Hipotesis

3.6.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi (R²) merupakan pengujian untuk melihat bagaimana kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi yang terjadi dalam variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi (R²) yaitu antara 0 sampai 1. Apabila nilai semakin kecil, maka menunjukkan kemampuan variabel independen terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Namun, apabila nilai

mendekati 1, maka variabel independen dikatakan bisa mampu menjelaskan kebutuhan informasi dalam memprediksi variabel dependen.

3.6.2.2 Uji F

Uji F yaitu pengujian yang dilakukan untuk menguji *goodness of fit model*. Apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka model fit sehingga hasil analisis regresi bisa digunakan sebagai dasar analisis.

3.6.2.3 Uji t

Uji t merupakan pengujian untuk menguji signifikansi koefisien dari variabel independen dalam memprediksi variabel dependen. Uji t menggunakan nilai signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dengan melihat kriteria tersebut, maka penentuan hipotesis yaitu apabila nilai signifikan $t \geq 0,05$, maka hipotesis ditolak atau tidak terdapat pengaruh signifikan. Namun apabila nilai signifikan $t \leq 0,05$, maka hipotesis diterima atau terdapat pengaruh signifikan.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk laporan keuangan tahunan dalam tahun periode 2017 sampai 2021 Bank Umum Syariah yang diperoleh dari website masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan sampel. Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan pada tabel 4.1, maka terpilih 13 Bank Umum Syariah di Indonesia yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan perbankan syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2017 sampai 2021.	13
2	Perusahaan perbankan syariah yang secara berkala mempublikasikan laporan tahunan dari tahun 2017 sampai 2021	13
3	Data-data yang dibutuhkan atas variabel-variabel yang akan diteliti tersedia dalam laporan tahunan masing-masing perusahaan perbankan syariah tahun periode 2017-2021	13
	<i>Jumlah Perusahaan Sampel</i>	13
	<i>Jumlah pengamatan (Jumlah sampel x 5 tahun penelitian)</i>	65

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.2 Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Dewan Direksi	65	2	10	4.58	1.695
Ukuran Dewan Komisaris	65	1	9	3.77	1.401
Ukuran Dewan Pengawas Syariah	65	2	4	2.32	.562
Ukuran Komite Audit	65	2	10	4.08	1.717
Ukuran Perusahaan	65	22.63	33.21	28.0855	3.51608
Pengungkapan Identitas Etika	65	.55	.74	.6534	.04487
Valid N (listwise)	65				

Sumber data: *IBM SPSS Statistics 26, 2023*

Berdasarkan tabel 4.2 yang menampilkan hasil dari statistik deskriptif data dengan jumlah sampel penelitian 65, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

4.2.1.1 Variabel Pengungkapan Identitas Etika

Hasil analisis terhadap variabel Pengungkapan Identitas Etika yaitu memiliki nilai minimum sebesar 0,55 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,74. Ini menunjukkan bahwa nilai terendah tingkat pengungkapan identitas etika dari 13 bank dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 0,55 serta nilai tertinggi dari pengungkapan identitas etikanya yaitu sebesar 0,74. Nilai rata-rata dari variabel Pengungkapan Identitas Etika pada perbankan syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu sebesar 0,6534. Sedangkan nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,04487.

4.2.1.2 Variabel Ukuran Dewan Direksi

Variabel ukuran dewan direksi merupakan total anggota direksi, memiliki nilai minimum sebesar 2, hal ini menunjukkan bahwa total anggota dewan direksi pada 13 perbankan syariah paling sedikit yaitu berjumlah 2 orang. Kemudian nilai maksimum variabel ukuran dewan direksi yaitu sebesar 10. Sedangkan nilai rata-rata variabel ukuran dewan direksi yaitu sebesar 4,58 dan nilai standar deviasi yaitu sebesar 1,695.

4.2.1.3 Variabel Ukuran Dewan Komisaris

Variabel ukuran dewan komisaris merupakan total anggota komisaris, memiliki nilai minimum yaitu sebesar 1, hal ini menunjukkan bahwa total anggota dewan komisaris pada 13 perbankan syariah paling sedikit yaitu berjumlah 1 orang. Kemudian nilai maksimum dari variabel ini yaitu sebesar 9. Nilai rata-rata dari variabel ukuran Dewan Komisaris yaitu sebesar 3,77, sedangkan untuk nilai standar deviasi yaitu sebesar 1,401.

4.2.1.4 Variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Variabel ukuran dewan pengawas syariah merupakan total anggota dewan pengawas syariah, memiliki nilai minimum sebesar 2, hal ini menunjukkan bahwa total anggota dewan pengawas syariah pada 13 perbankan syariah paling sedikit berjumlah 2 orang. Sedangkan nilai maksimum variabel ini yaitu sebesar 4. Kemudian nilai rata-rata variabel ukuran dewan pengawas syariah sebesar 2,32 dan nilai standar deviasi untuk variabel ini yaitu sebesar 0,562.

4.2.1.5 Variabel Ukuran Komite Audit

Variabel ukuran komite audit merupakan total anggota komite audit, memiliki nilai minimum 2, hal ini menunjukkan bahwa total anggota komite audit pada 13 perbankan syariah paling sedikit 2 orang. Kemudian nilai maksimum dari variabel ini yaitu sebesar 10. Nilai rata-rata variabel ukuran komite audit sebesar 4,08, sedangkan untuk nilai standar deviasinya sebesar 1,717.

4.2.1.6 Variabel Ukuran Perusahaan

Variabel ukuran perusahaan merupakan gambaran apakah perusahaan tersebut tergolong sebagai perusahaan besar atau kecil. Nilai minimum dari variabel ini yaitu sebesar 22,63, sedangkan nilai maksimum sebesar 33,21. Kemudian nilai rata-rata variabel ini yaitu sebesar 28,0855 dan nilai standar deviasi yaitu sebesar 3,51608.

4.2.2 Tingkat Pengungkapan Identitas Etika

Pengungkapan identitas etika dalam laporan tahunan 13 perbankan syariah tahun 2017 sampai 2021 yang menjadi sampel pada penelitian ini diurutkan berdasarkan skor EII. Berikut hasil poin yang diungkapkan perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil item yang diungkapkan

BANK UMUM SYARIAH	TOTAL ITEM YANG DIUNGKAPKAN					RATA-RATA ITEM
	2017	2018	2019	2020	2021	
Bank Mandiri Syariah	27	28	27	27	29	27.6
Bank BRI Syariah	27	27	26	26	29	27
Bank BNI Syariah	23	23	23	26	29	24.8
Bank BCA Syariah	25	25	25	25	25	25
Bank MayBank Syariah	27	27	28	27	27	27.2
Bank Aceh Syariah	28	28	28	28	28	28
Bank Victoria Syariah	24	25	23	25	26	24.6
Bank Panin Dubai Syariah	26	28	28	28	28	27.6
Bank Mega Syariah	28	27	28	28	31	28.4
Bank Bukopin Syariah	28	28	28	29	28	28.2
BTPNS	30	30	28	30	31	29.8
Bank Muamalat	29	29	30	30	30	29.6
Bank BJB Syariah	28	28	30	28	28	28.4
RATA-RATA PERTAHUN	26.9	27.2	27.1	27.5	28.4	

Tabel 4.3 menunjukkan hasil rata-rata jumlah item yang diungkapkan, dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa item yang diungkapkan mengalami peningkatan dari tahun 2017 yaitu 26,9 menjadi 27,2 di tahun 2018. Tetapi mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 27,1. Kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 27,5 di tahun 2020 dan 28,4 di tahun 2021. Rata-rata dari item yang diungkapkan selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai 2021 yang paling tinggi yaitu BTPNS sebanyak 29,8 item, sedangkan rata-rata item yang

paling sedikit diungkapkan yaitu Bank Victoria Syariah sebanyak 24,6 item.

Sementara itu, hasil EII ditunjukkan pada Tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4 Tingkat Pengungkapan EII

BANK UMUM SYARIAH	TOTAL EII PERTAHUN					RATA-RATA ITEM
	2017	2018	2019	2020	2021	
Bank Mandiri Syariah	0.64	0.67	0.64	0.64	0.69	0.66
Bank BRI Syariah	0.64	0.64	0.62	0.62	0.69	0.64
Bank BNI Syariah	0.55	0.55	0.55	0.62	0.69	0.59
Bank BCA Syariah	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.60
Bank MayBank Syariah	0.64	0.64	0.67	0.64	0.64	0.65
Bank Aceh Syariah	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
Bank Victoria Syariah	0.57	0.6	0.55	0.6	0.62	0.59
Bank Panin Dubai Syariah	0.62	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66
Bank Mega Syariah	0.67	0.64	0.67	0.67	0.74	0.68
Bank Bukopin Syariah	0.67	0.67	0.67	0.69	0.67	0.67
BTPNS	0.71	0.71	0.67	0.71	0.74	0.71
Bank Muamalat	0.69	0.69	0.71	0.71	0.71	0.70
Bank BJB Syariah	0.67	0.67	0.71	0.67	0.67	0.68
RATA-RATA PERTAHUN	0.64	0.65	0.65	0.65	0.68	

Berdasarkan hasil EII pada Tabel 4.4, rata-rata jumlah EII dari tahun 2017 sampai 2021 yaitu antara 0,64 sampai dengan 0,68. Selama tahun 2017 rata-rata EII yaitu sebesar 0,64, pada tahun 2018 sebesar 0,65, pada tahun 2019 sebesar 0,65, pada tahun 2020 sebesar 0,65, dan pada tahun 2021 sebesar 0,68. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah pengungkapan identitas etika oleh perbankan syariah. Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 sampai 2021 BTPNS memperoleh EII tertinggi yaitu sebesar 0,71. EII BTPNS yaitu sebesar 0,71 pada

tahun 2017, 0,71 pada tahun 2018, pada tahun 2019 sebesar 0,67, pada tahun 2020 sebesar 0,71, dan sebesar 0,74 pada tahun 2021. Kemudian perbankan syariah yang memperoleh EII terendah yaitu Bank BNI Syariah dan Bank Victoria Syariah. EII Bank BNI Syariah yaitu sebesar 0,55 pada tahun 2017, 0,55 pada tahun 2018, pada tahun 2019 sebesar 0,55, pada tahun 2020 sebesar 0,62, dan sebesar 0,69 pada tahun 2021. Sedangkan EII Bank Victoria Syariah yaitu sebesar 0,57 pada tahun 2017, 0,60 pada tahun 2018, pada tahun 2019 sebesar 0,55, pada tahun 2020 sebesar 0,60, dan sebesar 0,62 pada tahun 2021.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas Data

Uji Normalitas Data dilakukan untuk mengetahui apakah residual suatu model regresi berdistribusi dengan normal atau tidak disebut dengan uji normalitas. Karena dikatakan baik jika model regresi berdistribusi normal. Untuk menentukan normalitas data maka peneliti melakukan uji normalitas dengan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* melalui olah data SPSS. Jika data menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05, maka data terdistribusi normal. Namun jika data menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05, maka data terdistribusi tidak normal.

Tabel 4.5 Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04113552
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.085
	Negative	-.109
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber data: *IBM SPSS Statistics 26, 2023*

Berdasarkan hasil Uji Normalitas yang telah dilakukan peneliti menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* pada Tabel 4.5, diperoleh nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,054. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah terjadi multikolinier atau tidak antara variabel independen, untuk melihat apakah ditemukan korelasi tinggi serta sempurna pada regresi, dilihat menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan tolerance. Adanya multikolinearitas antar variabel independen jika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 .

tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen, maka model regresi bisa dikatakan baik jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$.

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.724	.056		12.996	.000	
	Ukuran Dewan Direksi	-.001	.007	-.021	-.080	.936	.212
	Ukuran Dewan Komisaris	.006	.007	.185	.793	.431	.261
	Ukuran Dewan Pengawas Syariah	.015	.016	.188	.930	.356	.348
	Ukuran Komite Audit	.000	.006	-.013	-.060	.952	.311
	Ukuran Perusahaan	-.004	.002	-.345	-2.339	.023	.655

a. Dependent Variable: Pengungkapan Identitas Etika

Sumber data: *IBM SPSS Statistics 26, 2023*

Pada Tabel 4.6 yang menunjukkan hasil Uji Multikolinearitas, diperoleh nilai *Tolerance* variabel ukuran dewan direksi sebesar 0,212, variabel ukuran dewan komisaris sebesar 0,261, variabel ukuran dewan pengawas syariah sebesar 0,348, variabel ukuran komite audit sebesar 0,311, dan variabel ukuran perusahaan sebesar 0,655. Sedangkan nilai VIF variabel ukuran dewan direksi sebesar 4,710, variabel ukuran dewan komisaris sebesar 3,835, variabel ukuran dewan pengawas syariah

sebesar 2,875, variabel ukuran komite audit sebesar 3,217, dan variabel ukuran perusahaan sebesar 1,526. Berdasarkan nilai yang dihasilkan, nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai *VIF* ≤ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bisa dikatakan baik karena tidak adanya multikolinieritas antar variabel independen.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat kesamaan varian dari nilai residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Peneliti melakukan Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji *Spearman Rho*. Apabila nilai signifikansi residual variabel independen diatas 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun apabila nilai signifikansi residual variabel independen dibawah 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas

			Correlations					
			Unstand ardized Residua l	Ukur an Dewa n Direk si	Ukur an Dew an Kom isari s	Ukuran Dewan Pengawa s Syariah	Ukura n Komit e Audit	Ukuran Perusah aan
Spearman's rho	Unstand ardized	Correlation Coefficient	1.000	.011	.056	.041	-.050	.065
	Residual	Sig. (2- tailed)	.	.931	.657	.744	.694	.606
		N	65	65	65	65	65	65
		Correlation Coefficient	.011	1.000	.647* *	.561**	.430**	.577**

Ukuran Dewan Direksi	Sig. (2-tailed)	.931	.	.000	.000	.000	.000
	N	65	65	65	65	65	65
Ukuran Dewan Komisaris	Correlation Coefficient	.056	.647*	1.000	.449**	.445**	.409**
	Sig. (2-tailed)	.657	.000	.	.000	.000	.001
	N	65	65	65	65	65	65
Ukuran Dewan Pengawas Syariah	Correlation Coefficient	.041	.561*	.449*	1.000	.500**	.217
	Sig. (2-tailed)	.744	.000	.000	.	.000	.083
	N	65	65	65	65	65	65
Ukuran Komite Audit	Correlation Coefficient	-.050	.430*	.445*	.500**	1.000	.379**
	Sig. (2-tailed)	.694	.000	.000	.000	.	.002
	N	65	65	65	65	65	65
Ukuran Perusahaan	Correlation Coefficient	.065	.577*	.409*	.217	.379**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.606	.000	.001	.083	.002	.
	N	65	65	65	65	65	65

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber data: *IBM SPSS Statistics 26, 2023*

Berdasarkan hasil dari Uji *Spearman Rho* diatas, diketahui bahwa variabel ukuran dewan direksi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,931, variabel ukuran dewan komisaris sebesar 0,657, variabel dewan pengawas syariah sebesar 0,744, variabel komite audit sebesar 0,694, dan variabel ukuran perusahaan sebesar 0,606. Berdasarkan nilai tersebut, nilai signifikansi residual variabel independen diatas 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.3.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu di periode t dengan kesalahan pengganggu di periode $t-1$ dalam model regresi linier yang terjadi sebelumnya. Model regresi yang baik yaitu regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Peneliti menguji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson (Uji DW). Tidak terdapat autokorelasi jika $dU < DW < 4-dU$.

Tabel 4.8 Uji Durbin Watson

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.399 ^a	.160	.088	.04284	.704	

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Direksi

b. Dependent Variable: Pengungkapan Identitas Etika

Sumber data: *IBM SPSS Statistics 26, 2023*

Berdasarkan dari hasil Uji Autokorelasi pada Tabel 4.8, nilai Durbin-Watson yaitu sebesar 0,704. Nilai dU sebesar 1,7673 dan nilai dL sebesar 1,4378 yang diperoleh dari tabel Durbin Watson dengan tingkat signifikansi 5%. Nilai $4-dU$ yaitu sebesar 2,5622. Tidak terdapat autokorelasi jika $dU < DW < 4-dU$, berdasarkan nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa $1,7673 < 0,704 < 2,5622$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi pada model regresi. Oleh karena itu, untuk mengatasi terjadinya autokorelasi perlu dilakukan transformasi *Cochran Orcutt*.

Tabel 4.9 Transformasi Cochran Orcutt

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.563 ^a	.317	.258	.03066	1.914

a. Predictors: (Constant), LAG_X5, LAG_X3, LAG_X1, LAG_X4, LAG_X2

b. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber data: *IBM SPSS Statistics 26, 2023*

Berdasarkan dari hasil transform pada Tabel 4.8, nilai Durbin-Watson yaitu sebesar 1,914. Jika $dU < DW < 4-dU$, berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa $1,7673 < 1,914 < 2,5622$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

4.2.4 Uji Hipotesis

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen yaitu dewan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, komite audit, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pengungkapan identitas etika.

Tabel 4.10 Analisis Linear Berganda

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.724	.056		12.996	.000		
	Ukuran Dewan Direksi	-.001	.007	-.021	-.080	.936	.212	4.710
	Ukuran Dewan Komisaris	.006	.007	.185	.793	.431	.261	3.835
	Ukuran Dewan Pengawas Syariah	.015	.016	.188	.930	.356	.348	2.875
	Ukuran Komite Audit	.000	.006	-.013	-.060	.952	.311	3.217
	Ukuran Perusahaan	-.004	.002	-.345	-2.339	.023	.655	1.526

a. Dependent Variable: Pengungkapan Identitas Etika

Sumber data: *IBM SPSS Statistics 26, 2023*

Berdasarkan hasil yang terdapat pada Tabel 4.10, nilai konstanta diketahui sebesar 0,724, nilai koefisien dari ukuran dewan direksi sebesar -0,001, nilai koefisien dari ukuran dewan komisaris sebesar 0,006, nilai koefisien dari ukuran dewan pengawas syariah sebesar 0,015, nilai koefisien dari ukuran komite audit sebesar 0,000, dan nilai koefisien dari ukuran perusahaan sebesar -0,004. Dari nilai tersebut, dapat dibentuk persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = 0,724 + (-0,001)X_1 + (0,006)X_2 + (0,015)X_3 + (0,000)X_4 + (-0,004)X_5 + e$$

$\alpha = 0,724$ merupakan nilai konstanta yang berarti jika nilai Ukuran Dewan Direksi (X1), Ukuran Dewan Komisaris (X2), Ukuran Dewan Pengawas Syariah (X3), Ukuran Komite Audit (X4), dan Ukuran Perusahaan (X5) adalah 0, maka nilai konsistensi Pengungkapan Identitas Etika (Y) yaitu sebesar 0,724.

$\beta_1 = -0,001$ merupakan nilai koefisien ukuran dewan direksi yang berarti jika terjadi penambahan jumlah anggota dewan direksi sebanyak 1% maka pengungkapan identitas etika akan meningkat sebesar -0,001. Nilai koefisien bernilai positif memiliki arti perubahan jumlah anggota dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika.

$\beta_2 = 0,006$ merupakan nilai koefisien ukuran dewan komisaris yang berarti jika terjadi penambahan jumlah anggota dewan komisaris sebanyak 1% maka pengungkapan identitas etika akan meningkat sebesar 0,006. Nilai koefisien bernilai positif memiliki arti perubahan jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika.

$\beta_3 = 0,015$ merupakan nilai koefisien ukuran dewan pengawas syariah yang berarti jika terjadi penambahan jumlah anggota dewan pengawas syariah sebanyak 1% maka pengungkapan identitas etika akan meningkat sebesar 0,015. Nilai koefisien bernilai positif memiliki arti perubahan jumlah anggota dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika.

$\beta_4 = 0,000$ merupakan nilai koefisien ukuran komite audit yang berarti jika terjadi penambahan jumlah anggota komite audit sebanyak 1% maka pengungkapan identitas etika akan meningkat sebesar 0,000. Nilai koefisien bernilai positif

memiliki arti perubahan jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika.

$\beta_5 = -0,004$ merupakan nilai koefisien ukuran perusahaan yang berarti jika terjadi penambahan ukuran perusahaan sebanyak 1% maka pengungkapan identitas etika akan menurun sebesar -0,004. Nilai koefisien bernilai negative memiliki arti perubahan ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap pengungkapan identitas etika.

4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi (R²) merupakan pengujian untuk melihat bagaimana kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi yang terjadi dalam variabel dependen.

Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.399 ^a	.160	.088	.04284

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Direksi

Sumber data: *IBM SPSS Statistics 26, 2023*

Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) pada Tabel 4.11, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,088 atau sebesar 8,8% . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dikatakan bisa mampu menjelaskan

kebutuhan informasi dalam memprediksi variabel dependen sebesar 8,8%, dan sisanya 91,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

4.2.4.2 Uji F

Uji F dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.12 Uji Signifikansi Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.021	5	.004	2.240	.062 ^b
	Residual	.108	59	.002		
	Total	.129	64			

a. Dependent Variable: Pengungkapan Identitas Etika

b. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Direksi

Sumber data: *IBM SPSS Statistics 26, 2023*

Berdasarkan hasil Uji Signifikansi F pada Tabel 4.12, diperoleh nilai signifikansi yaitu sebesar 0,062 lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa model tidak fit.

4.2.4.3 Uji Signifikan t

Uji Signifikan t merupakan pengujian untuk menguji signifikansi koefisien dari variabel independen dalam memprediksi variabel dependen.

Tabel 4.13 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.724	.056		12.996	.000
	Ukuran Dewan Direksi	-.001	.007	-.021	-.080	.936
	Ukuran Dewan Komisaris	.006	.007	.185	.793	.431
	Ukuran Dewan Pengawas Syariah	.015	.016	.188	.930	.356
	Ukuran Komite Audit	.000	.006	-.013	-.060	.952
	Ukuran Perusahaan	-.004	.002	-.345	-2.339	.023

a. Dependent Variable: Pengungkapan Identitas Etika

Sumber data: *IBM SPSS Statistics 26, 2023*

Berdasarkan hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t) pada Tabel 4.13, diperoleh nilai signifikansi ukuran dewan direksi yaitu sebesar 0,936 lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika.

Nilai signifikansi ukuran dewan komisaris yaitu sebesar 0,431 lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika.

Nilai signifikansi ukuran dewan pengawas syariah yaitu sebesar 0,356 lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika.

Nilai signifikansi ukuran komite audit yaitu sebesar 0,952 lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika.

Nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan yaitu sebesar 0,023 lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh negative signifikan terhadap pengungkapan identitas etika.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh ukuran Dewan Direksi terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah

Berdasarkan pengujian statistika, variabel ukuran dewan direksi memperoleh nilai statistik Uji-t yaitu sebesar -0,080 dan nilai signifikansi t yaitu sebesar 0,936. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi t lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan identitas etika pada bank umum syariah periode 2017 hingga 2021. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika dan H1 ditolak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Rahman dkk. (2016) dan Rizwan dkk. (2022) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Milenia & Syafei (2021) serta Khasanah & Amalia (2021) yang menyatakan ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika pada bank

syariah. Jumlah dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan, karena dalam perumusan kebijakan mengenai pengungkapan identitas etika, perusahaan hanya melibatkan tim manajemennya sehingga direksi tidak terlalu banyak mengambil alih hal ini (Khasanah & Amalia, 2021).

4.3.2 Pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah

Berdasarkan pengujian statistika, variabel ukuran dewan komisaris memperoleh nilai statistik Uji-t yaitu sebesar 0,793 dan nilai signifikansi t yaitu sebesar 0,431. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi t lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan identitas etika pada bank umum syariah periode 2017 hingga 2021. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika dan H2 ditolak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Rokhaniyah (2020) dan Murdiansyah (2021) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Milenia & Syafei (2021) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah. Hal ini disebabkan karena dewan komisaris yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap masalah operasional perbankan syariah. Selain itu, Dewan komisaris hanya sebagai badan pengawas utama untuk operasional perusahaan yang bertugas mengawasi serta memberikan saran dalam mengelola bank berupa nasihat kepada direksi. Dewan direksi tidak

belum dapat memberikan saran yang berkaitan dengan pengungkapan identitas etika karena tidak memiliki tugas maupun tanggungjawab yang berhubungan dengan pengungkapan identitas etika.

4.3.3 Pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah

Berdasarkan pengujian statistika, variabel ukuran dewan pengawas syariah memperoleh nilai statistik Uji-t yaitu sebesar 0,930 dan nilai signifikansi t yaitu sebesar 0,356. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi t lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan identitas Etika pada bank umum syariah periode 2017 hingga 2021. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika dan H3 ditolak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Milenia & Syafei (2021) yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Harun dkk. (2020) dan Khasanah & Amalia (2021) yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah.

4.3.4 Pengaruh ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah

Berdasarkan pengujian statistika, variabel ukuran komite audit memperoleh nilai statistik Uji-t yaitu sebesar -0,060 dan nilai signifikansi t yaitu sebesar 0,952.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi t lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel ukuran komite audit terhadap pengungkapan identitas etika pada bank umum syariah periode 2017 hingga 2021. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas Etika dan H4 ditolak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Rokhaniyah (2020) dan Khasanah & Amalia (2021) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan identitas etika pada Bank Syariah. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Harun dkk. (2020) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah. Komite audit bertanggung jawab dalam memastikan audit profesional atas laporan keuangan dan kinerja operasional perusahaan. Sehingga dengan adanya banyak anggota komite audit di perbankan syariah tidak dapat memberikan tambahan pengungkapan, karena komite audit hanya berperan sebagai pengawas untuk memvalidasi bahwa perbankan syariah mengikuti norma-norma dalam memberikan lebih banyak pengungkapan identitas etika.

4.3.5 Pengaruh ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah

Berdasarkan pengujian statistika, variabel ukuran perusahaan memperoleh nilai statistik Uji- t yaitu sebesar -2,339 dan nilai signifikansi t yaitu sebesar 0,023. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel ukuran perusahaan terhadap pengungkapan identitas etika pada bank umum syariah periode 2017 hingga 2021. Maka dapat

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negative signifikan terhadap pengungkapan identitas etika dan H5 ditolak. Hasil pengujian statistika menunjukkan nilai ukuran perusahaan sebesar -0,004. Nilai negatif pada -0,004 menyatakan pengaruh yang negatif antar variabel independen terhadap variabel dependennya. Artinya setiap kenaikan variabel ukuran perusahaan sebesar -0,004 maka akan menurunkan variabel pengungkapan identitas etika sebesar -0,004. Sehingga dapat disimpulkan variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan identitas etika. Hal ini berlawanan dengan hasil uji hipotesis penelitian ini yaitu “Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan identitas etika bank syariah”, maka hipotesis tidak didukung.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Prasetyoningrum (2018) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika pada bank syariah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 hingga 2021.
2. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 hingga 2021.
3. Ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 hingga 2021.
4. Ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan identitas etika pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 hingga 2021.
5. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan identitas etika Bank Umum Syariah di Indonesia pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 hingga 2021.

5.2 Saran

Pada penelitian ini sudah dilakukan analisis dan kesimpulan, maka memunculkan saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel baru yang berpengaruh terhadap pengungkapan identitas etika seperti ukuran Dewan Komisaris Independen, Komite Manajemen Resiko, dan lain sebagainya.
2. Penelitian ini hanya menggunakan Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan Unit Usaha Syariah (UUS), atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan membandingkan pengungkapan identitas etika dengan negara yang memiliki perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R., Rehman, R. U., Kanwal, M., Naseem, M. A., & Ahmad, M. I. (2022). Determinants of corporate social responsibility disclosure of banking sector in Pakistan. *Social Responsibility Journal*, 18(5), 1019-1034.
- Al Maeeni, F., Ellili, N. O. D., & Nobanee, H. (2022). Impact of corporate governance on corporate social responsibility disclosure of the UAE listed banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 1985-2517.
- Bertens, K. (1993). Etika . *Gramedia Pustaka Utama*, Vol. 21.
- Edmund R. Gray, J. M. (1998). Managing image and corporate reputation. *Long Range Planning*, Vol 31 (5). pp 685-692.
- Fitria, Z. M., & Sulhani, S. (2021). Shariah Conformity dan Profitability: Apakah Ethical Identity Berpengaruh di Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 9(2, Oktober), 113-129.
- Gadhoun, M. A., Sori, Z. B. M., Ramadilli, S., & Mahomed, Z. (2022). Communicated ethical identity disclosure (CEID) of Islamic banks under the AAOIFI and IFRS accounting regimes: a global evidence. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol 13(5), 737-759.
- Hajawiyah, A., Siswantoro, D., & Dewi, M. K. (2019). Determinants of Islamic social reporting in Indonesia and Malaysia. *In Asia Pacific Business and Economics Conference (APBEC 2018)*, Vol 89.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. *Journal of business Ethics*, 76, 97-116.
- Harun, M. S., Hussainey, K., Mohd Kharuddin, K. A., & Farooque, O. A. (2020). CSR disclosure, corporate governance and firm value: a study on GCC Islamic banks. *International Journal of Accounting & Information Management*, 28(4), 607-638.
- Istifaroh, A., & Subardjo, A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1-19.
- Jahid, M. A., Rashid, M. H. U., Hossain, S. Z., Haryono, S., & Jatmiko, B. (2020). Impact of corporate governance mechanisms on corporate social responsibility disclosure of publicly-listed banks in Bangladesh. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)*, 7(6), 61-71.
- Khasanah, E. N., & Amalia, W. R. (2021). Determinants of Ethical Identity Disclosure in Islamic Banks: Empirical Evidence in Indonesian Islamic Banks. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 13(1), 31-45.

- Mediawati, E., & Afiyana, I. F. (2018). Dewan pengawas syariah dan pengungkapan sukarela pada bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 259-268.
- Milenia, H. F., & Syafei, A. W. (2021). Analisis Pengaruh Islamic Governance terhadap Pengungkapan ISR pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(2), 110.
- Murdiansyah, I. (2021). Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 43-56.
- Nazaruddin, I. (2008). Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 9(2), 159–172.
- Pangesti, E. T., & Pramono, N. H. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Syariah di Indonesia. *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 94-110.
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Efisiensi Biaya, Dan Umur Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 2654-8569.
- Rahman, R. A., Saimi, N. S., & Danbatta, B. L. (2016). Determinants of Ethical Identity Disclosure in Islamic Banks: An Analysis of Practices in Bahrain and Malaysia (Penentu-penentu Etika Pendedahan Identiti di Bank-bank Islam: Analisa Perlaksanaan di Bahrain dan Malaysia). *Jurnal Pengurusan*, 46, 13 - 22.
- Rokhaniyah, S. (2020). Investigasi Empiris: Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Sukarela pada Perbankan Syariah di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Rosiana, R., Arifin, B., & Hamdani, M. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Islamic Governance Score terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(1), 87–104.
- Solihin, F. (2001). Mengenal Bank “Syariah” Lembaga Keuangan untuk Umum. *The Winners*, 2(2), 163-171.
- Suwandi, I., Arifianti, R., & Rizal, M. (2018). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1), 45-54.
- Vera Zelenović, P., & Davidović, M. (2011). Corporate Identity of Banks In A Function of Market Competitiveness. *In International Symposium Engineering Management And Competitiveness*.

Wijaya, B. S. T. (2013). Corporate Ethical Identity Perbankan Syariah di Indonesia.
Tsaqafah, 9(2), 337-356.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Hasil Perhitungan EII

BANK UMUM SYARIAH	TAHUN	DIMENSI						TOTAL	EII BANK PERTAH UN	RATA-RATA EII 5 TAHUN SETIAP BANK
		A	B	C	D	E	F			
Bank Mandiri Syariah	2017	4	3	3	2	11	4	27	0.64	66%
	2018	4	3	4	2	11	4	28	0.67	
	2019	4	3	4	2	10	4	27	0.64	
	2020	4	3	4	2	10	4	27	0.64	
	2021	4	3	4	2	12	4	29	0.69	
Bank BRI Syariah	2017	4	3	4	2	11	3	27	0.64	64%
	2018	4	3	4	2	11	3	27	0.64	
	2019	4	3	4	2	10	3	26	0.62	
	2020	4	3	4	2	10	3	26	0.62	
	2021	4	3	4	2	12	4	29	0.69	
Bank BNI Syariah	2017	4	3	4	2	6	4	23	0.55	59%
	2018	4	3	4	2	6	4	23	0.55	
	2019	4	3	4	2	6	4	23	0.55	
	2020	4	3	4	2	6	4	26	0.62	
	2021	4	3	4	2	12	4	29	0.62	
Bank BCA Syariah	2017	4	3	4	1	9	4	25	0.60	60%
	2018	4	3	4	1	9	4	25	0.60	
	2019	4	3	4	1	9	4	25	0.60	
	2020	4	3	4	1	9	4	25	0.60	
	2021	4	3	4	1	9	4	25	0.60	
Bank MayBank Syariah	2017	4	3	4	2	10	4	27	0.64	65%
	2018	4	3	4	2	10	4	27	0.64	
	2019	4	3	4	2	11	4	28	0.67	
	2020	4	3	4	2	10	4	27	0.64	
	2021	4	3	4	2	10	4	27	0.64	
Bank Aceh Syariah	2017	4	3	4	2	11	4	28	0.67	67%
	2018	4	3	4	2	11	4	28	0.67	
	2019	4	3	4	2	11	4	28	0.67	
	2020	4	3	4	2	11	4	28	0.67	
	2021	4	3	4	2	11	4	28	0.67	
Bank Victoria Syariah	2017	4	3	4	0	9	4	24	0.57	59%
	2018	4	3	4	0	10	4	25	0.60	
	2019	4	3	3	0	9	4	23	0.55	
	2020	4	3	4	0	10	4	25	0.60	
	2021	4	3	4	0	11	4	26	0.62	
Bank Panin Dubai Syariah	2017	4	3	4	2	9	4	26	0.62	66%
	2018	4	3	4	2	11	4	28	0.67	
	2019	4	3	4	2	11	4	28	0.67	
	2020	4	3	4	2	11	4	28	0.67	
	2021	4	3	4	2	11	4	28	0.67	
Bank Mega Syariah	2017	4	3	4	2	11	4	28	0.67	68%
	2018	4	3	3	2	11	4	27	0.64	
	2019	4	3	4	2	11	4	28	0.67	
	2020	4	3	4	2	11	4	28	0.67	
	2021	4	3	4	2	13	4	31	0.74	

Bank Bukopin Syariah	2017	5	3	4	2	10	4	28	0.67	67%
	2018	5	3	4	2	10	4	28	0.67	
	2019	5	3	4	2	10	4	28	0.67	
	2020	5	3	4	2	11	4	29	0.69	
	2021	5	3	4	2	10	4	28	0.67	
BTPNS	2017	5	3	4	2	12	4	30	0.71	71%
	2018	5	3	4	2	12	4	30	0.71	
	2019	4	3	4	2	11	4	28	0.67	
	2020	5	3	4	2	12	4	30	0.71	
	2021	5	3	4	2	13	4	31	0.74	
Bank Muamalat	2017	4	3	4	2	11	4	29	0.69	70%
	2018	4	3	3	2	11	4	29	0.69	
	2019	4	3	4	2	12	4	30	0.71	
	2020	4	3	4	2	12	4	30	0.71	
	2021	4	3	4	2	12	4	30	0.71	
Bank BJB Syariah	2017	4	3	4	2	11	4	28	0.67	68%
	2018	4	3	3	2	11	4	28	0.67	
	2019	4	3	4	2	13	4	30	0.71	
	2020	4	3	4	2	11	4	28	0.67	
	2021	4	3	4	2	11	4	28	0.67	

LAMPIRAN 2

Hasil Data Variabel Independen

BANK UMUM SYARIAH	TAHUN	UKURAN DEWAN DIREKSI	UKURAN DEWAN KOMISARIS	UKURAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH	UKURAN KOMITE AUDIT	UKURAN PERUSAHAAN
Bank Mandiri Syariah	2017	7	4	3	7	Rp32.108
	2018	5	4	3	6	Rp32.219
	2019	6	3	3	4	Rp32.352
	2020	9	5	3	7	Rp32.474
	2021	10	9	4	10	Rp33.212
Bank BRI Syariah	2017	5	5	2	5	Rp31.082
	2018	4	4	2	6	Rp31.266
	2019	5	4	2	5	Rp31.395
	2020	5	2	2	3	Rp31.687
	2021	10	9	4	10	Rp33.212
Bank BNI Syariah	2017	4	4	2	2	Rp31.181
	2018	6	5	2	3	Rp31.346
	2019	5	5	3	6	Rp31.543
	2020	6	4	2	6	Rp31.639
	2021	10	9	4	10	Rp33.212
Bank BCA Syariah	2017	4	3	2	3	Rp29.416
	2018	4	3	2	3	Rp29.586
	2019	4	3	2	4	Rp29.787
	2020	4	3	2	3	Rp29.905
	2021	4	3	2	3	Rp29.996
Bank MayBank Syariah	2017	4	3	2	4	Rp27.874
	2018	3	3	2	4	Rp27.218
	2019	3	3	2	4	Rp27.296
	2020	4	4	2	4	Rp27.304
	2021	5	4	2	3	Rp28.407
Bank Aceh Syariah	2017	5	3	2	3	Rp30.750
	2018	4	3	2	3	Rp30.771
	2019	2	1	2	3	Rp30.855
	2020	5	3	3	4	Rp30.869
	2021	5	4	3	5	Rp30.969
Bank Victoria Syariah	2017	4	3	2	3	Rp28.326
	2018	4	3	2	4	Rp28.385
	2019	4	3	2	4	Rp28.447
	2020	4	3	2	4	Rp28.462
	2021	5	3	3	3	Rp23.940
Bank Panin Dubai Syariah	2017	3	3	2	3	Rp22.878
	2018	3	3	2	3	Rp22.895
	2019	3	3	2	3	Rp23.133
	2020	3	3	2	3	Rp23.148
	2021	4	3	2	3	Rp23.392
Bank Mega Syariah	2017	3	3	2	3	Rp22.674
	2018	3	3	2	3	Rp22.716
	2019	4	3	2	3	Rp22.804
	2020	4	3	2	3	Rp23.503
	2021	3	3	2	3	Rp23.365
	2017	4	4	2	3	Rp29.600

Bank Bukopin Syariah	2018	3	4	2	3	Rp29.476
	2019	3	3	2	2	Rp29.539
	2020	3	3	2	3	Rp29.284
	2021	3	3	2	3	Rp29.459
BTPNS	2017	5	4	2	4	Rp29.845
	2018	5	4	2	4	Rp30.119
	2019	5	4	2	4	Rp30.364
	2020	4	4	2	3	Rp30.430
	2021	5	4	2	4	Rp30.551
Bank Muamalat	2017	6	5	3	5	Rp24.845
	2018	5	5	3	3	Rp24.770
	2019	6	3	3	3	Rp24.646
	2020	6	5	2	3	Rp24.660
	2021	6	5	3	3	Rp24.799
Bank BJB Syariah	2017	5	4	3	4	Rp22.766
	2018	3	4	3	5	Rp22.632
	2019	3	3	3	5	Rp22.767
	2020	3	3	2	5	Rp22.908
	2021	4	3	2	5	Rp23.061